# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 KABUPATEN BANTUL

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional;
b. bahwa untuk melaksanakan tujuan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang rencana kerja perangkat daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Renja PD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran Perangkat Daerah Tahun 2025 dan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Pasal 3

(1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 5 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 41 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

# RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

# SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN BANTUL

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Sekretariat Daerah. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2025 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2025.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1.1 Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

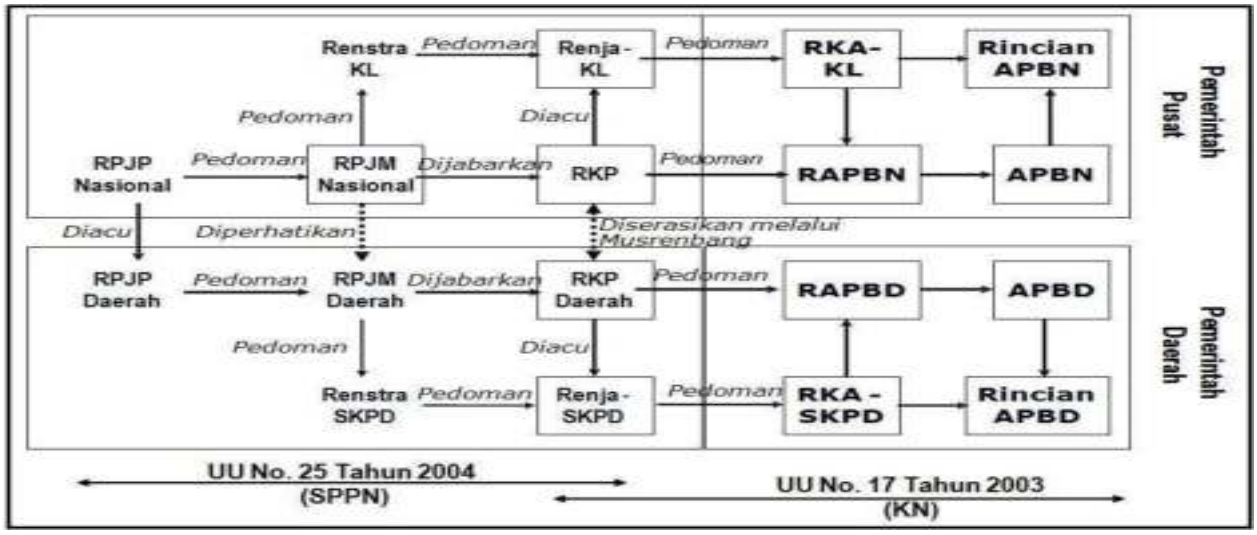


Gambar 1.1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;
c. Penyusunan rancangan;
d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

e. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);

f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 48);
n. Peratuan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 34).

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.
2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Derah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

## 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023;
2. Evaluasi Tahun 2023 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan perkiraan realisasi Tahun 2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2023. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.1

Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan

Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

s.d Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| Bagian Perencanaan dan Keuangan | | | | | | | | | | |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
| 4.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
| 4.01.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | | | | |
| | | Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20 Dokumen | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % | 4 Dokumen | 8 Dokumen | 100 % |
| 4.01.01.2.01.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil | 8 Dokumen | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | 2 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | | Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | | | | | |
| 4.01.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan realisasi, evaluasi dan pelaporan | 50 Orang | 50 Orang | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan | | 2 Laporan | 2 Laporan | 100 % | 1 Laporan | 3 Laporan | 100 % |
| 4.01.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan Kinerja Sekretariat Daerah | 2 Dokumen | 2 Dokumen | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 20 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 % | 4 Laporan | 8 Laporan | 100 % |
| 4.01.01.2.01.07 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
| 4.01.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Pembayaran gaji dan tunjangan ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | |
| | | Pembayaran TPP | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | |
| | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 8568 Orang/Bulan | - | 2142 Orang/Bulan | 2142 Orang/Bulan | 100 % | 2142 Orang/Bulan | 4284 Orang/Bulan | 100 % |
| 4.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi | Laporan pelaksanaan tugas kepegawaian dan barang | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 48 Dokumen | - | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 % | 12 Dokumen | 24 Dokumen | 100 % |
| 4.01.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Dokumen laporan keuangan | 85 Dokumen | 85 Dokumen | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 133 Laporan | - | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 12 Laporan | 24 Laporan | 100 % |
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | 100 Persen | 100 Persen | 100 % |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Peralatan Listrik/Penerangan Kantor | 100 Persen | 100 Persen | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 22 Paket | | 3 Paket | 3 Paket | 100 % | | | |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ATK Sarana Prasarana kantor alat rumah tangga | 2 Paket | 2 Paket | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 150 Paket | - | 20 Paket | 20 Paket | 100 % | | | |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Belanja Cetak dan Penggandaan | 100 Persen | 100 Persen | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | - | 3 Paket | 3 Paket | 100 % | | | |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Langganan Surat Kabar | 12 Bulan | 12 Bulan | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 96 Dokumen | | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 100 % | 12 Dokumen | 36 Dokumen | 100 % |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah tamu | 75 OH | 75 OH | | | | | | |
| | | Jumlah rapat koordinasi | 83 OH | 83 OH | | | | | | |
| | | Jumlah perjalanan dinas dalam kota | 80 OP | 80 OP | | | | | | |
| | | Jumlah perjalanan dinas dalam negeri | 18 OP | 18 OP | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 124 Laporan | - | 14 Laporan | 14 Laporan | 100 % | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | - | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | | | |
| 4.01.01.2.06.10 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | | | |
| 4.01.01.2.06.10 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | | | |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 150 Lembar | 150 Lembar | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 4 Laporan | - | 0 Laporan | 0 Laporan | 0 % | | | |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah ATK | 25 Jenis | 25 Jenis | | | | | | |
| | | Jumlah pembelian kebersihan | 5 Jenis | 5 Jenis | | | | | | |
| | | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor | 5 Jenis | 5 Jenis | | | | | | |
| | | Sekat ruang rapat | 1 Paket | 1 Paket | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 20 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 % | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pengelola keuangan | 120 OB | 120 OB | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 48 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | | | |
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | | | |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan kendaraan roda 2 | 3 Unit | 3 Unit | | | | | | |
| | | Pemelihraan kendaraan roda 4 | 2 Unit | 2 Unit | | | | | | |
| | | Perizinan kendaraan | 5 Unit | 5 Unit | | | | | | |
| | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 Unit | - | 5 Unit | 5 Unit | 100 % | | | |
| 4.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 60 Unit | | 2 Unit | 2 Unit | 100 % | | | |
| 4.01.01.2.09.10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 100 % | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | |
| Bagian Hukum | | | | | | | | | | |
| 4.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Nilai AKIP | 85 angka | 83 angka | 83 angka | 83,36 angka | 100 % | | | |
| 4.01.01.2.06 | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan administrasi umum perangkat daerah | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100% | | | |
| 4.01.01.2.06.0005 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penggandaan | 60000 lembar | 67271 lembar | | | | | | |
| | | Jumlah cetakan | 3 jenis | 3 jenis | | | | | | |
| | | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | | | 12 laporan | 12 laporan | 100% | | | |
| 4.01.01.2.06.0006 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Surat kabar | 1 jenis | 1 jenis | | | | | | |
| | | Jumlah buku | 10 buku | 23 buku | | | | | | |
| | | Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundangan | | | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | | | |
| 4.01.01.2.06.0009 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan | Jumlah tamu | 250 0rang | 250 orang | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | |
| | | Jumlah perjalanan dinas | 180 OP | 180 OP | | | | | | |
| | | Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | | 12 laporan | 12 laporan | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | | | 10 paket | 10 paket | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan | | | 4 paket | 4 paket | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.08 | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu | | | 12 laporan | 12 laporan | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.10 | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.11 | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan SPBE | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian kinerja penyediaan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100% | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.01.2.08.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan | Jumlah materai | 300 lembar | 180 lembar | | | | | | |
| | | Jumlah ATK | 25 paket | 25 paket | | | | | | |
| | | Jumlah alat kebersihan | 6 jenis | 6 jenis | | | | | | |
| | | Jumlah pemeliharaan rutin/berkala | 5 jenis | 5 jenis | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | 4 laporan | 4 laporan | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.02 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah | 100 persen | 100 persen | | | | | | |
| 4.01.01.2.02.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah pengelola keuangan dan barang | 120 orang | 120 orang | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.09 | Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian kinerja pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 persen | 100 persen | | | | | | |
| 4.01.01.2.09.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak | Jumlah Kendaraan Dinas | 5 unit | 5 unit | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | |
| | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | 4 unit | 4 unit | 100% | - | - | - |
| 04.01.02 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Perda dan Perkada yang diharmonisasi | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| 4.01.02.2.03 | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen |
| 4.01.02.2.03.0001 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Rapaerda | 12 dokumen | 12 dokumen | | | | | | |
| | | Jumlah Kajian NA | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | |
| | | Jumlah Publikasi Raperda | 4 tayang | 4 tayang | | | | | | |
| | | Jumlah Publik Hearing | 4 angkatan | 4 angkatan | | | | | | |
| | | Jumlah SK | 500 dokumen | 615 dokumen | | | | | | |
| | | Jumlah Perbup | 150 dokumen | 149 dokumen | | | | | | |
| | | Jumlah Produk Hukum yang disusun | | | 660 dokumen | 683 dokumen | 103% | 500 dokumen | 1955 dokumen | 100 % |
| 4.01.02.2.03.0002 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah embrio kadarkum | 4 Kelompok | 5 kelompok | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | | Jumlah forum RANHAM | 1 angkatan | 1 angkatan | | | | | | |
| | | Jumlah bantuan hukum non litigasi | 5 permasalahan | 2 permasalahan | | | | | | |
| | | Jumlah bantuan hukum litigasi | 5 kasus | 8 kasus | | | | | | |
| | | Jumlah pendampingan bantuan hukum warga miskin | 5 kasus | 17 kasus | | | | | | |
| | | Jumlah Penyuluhan Hukum | 4 angkatan | 5 angkatan | | | | | | |
| | | Jumah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum | | | 12 kasus | 16 kasus | 133% | 10 kasus | 58 kasus | 100 % |
| 4.01.02.2.03.0003 | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi | Jumlah pendokumentasin produk hukum | 650 dokumen | 776 dokumen | | | | | | |
| | | Jumlah penerbitan LD | 150 eks | 150 eks | | | | | | |
| | | Jumlah Sosialisasi | 200 orang | 200 orang | | | | | | |
| | | Pembinaan Petugas JDIH | 100 orang | 100 orang | | | | | | |
| | | Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan | | | 660 dokumen | 672 dokumen | 102% | 550 dokumen | 1948 dokumen | 100 % |
| 4.01.04 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan | 88 persen | 88 persen | 88,5 persen | 88,5 persen | 89 persen | 89 persen | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | | | | | | | | | |
| 4.01.04.5.01 | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Capaian Kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | 100 persen | | |
| 4.01.04.5.01.0005 | Sub Kegiatan Penyusunan rancangan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan | Laporan penyelenggaraan regulasi tindak lanjut keistimewaan | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | |
| | | Peraturan Bupati | 4 dokumen | 4 dokumen | | | | | | |
| | | Kajian penyesuaian regulasi tindak lanjut keistimewaan | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | |
| | | Sosialisasi Perbup | 300 orang | 300 orag | | | | | | |
| | | Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan | | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | 2 dokumen | 8 dokumen | 100 % |
| 4.01.04.5.01.0008 | Sub Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Bimtek penyusunan perkal | 300 orang | 300 orang | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | | Laporan penyelarasan produk hukum kalurahan | 1 laporan | 1 laporan | | | | | | |
| | | Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan | | | 1 dokumen | 1 dokumen | 100% | 1 dokumen | 3 dokumen | 100 % |
| Bagian Tata Pemerintahan | | | | | | | | | | |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 83 | 83 | 83,36 | 100,43 | - | - | - |
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 persen | 0 | 100 persen | 100 persen | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 48 dokumen | 0 | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Alat Listrik | | 4 | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 16 paket | 0 | 1 paket | 1 paket | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | | 14 | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 56 Paket | 0 | 4 Paket | 4 Paket | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 40 paket | 0 | 2 Paket | 2 Paket | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Cetak | 2 Jenis | 2 Jenis | | | | | | |
| | | Penggandaan | 18260 lembar | 18260 lembar | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 16 paket | 0 | 5 paket | 5 paket | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 48 dokumen | 0 | 12 dokumen | 12 dokumen | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 300 laporan | 0 | 2 laporan | 2 laporan | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 dokumen | 0 | 300 dokumen | 300 dokumen | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 4 dokumen | 0 | 4 dokumen | 4 dokumen | 100 % | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD (Bag Tapem) | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Materai | 250 Lembar | 250 Lembar | | | | | | |
| | | Pengiriman dokumen | 1 Kali | 1 Kali | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 36 Laporan | 0 | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Kebersihan Kantor | 8 Jenis | 8 Jenis | | | | | | |
| | | Pemeliharaan peralatan dan mesin | 7 Jenis | 7 Jenis | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 16 Laporan | 0 | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 120 OB | 120 OB | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 48 Laporan | 0 | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD (Bag Adpem) | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Bahan bakar 1 jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | 3 Unit | 3 Unit | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 | 1 Unit | 1 Unit | | | | | | |
| | | Perizinan kendaraan | 4 Unit | 4 Unit | | | | | | |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | 4 Unit | 4 Unit | 100 % | - | - | - |
| 04.01.02 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 92 Persen | 92 % | 92 % | 92 % | 100 % | 92 % | 92 % | 100 % |
| 4.01.02.2.01 | Administrasi Tata Pemerintahan | Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan | 100 Persen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.01.02.2.01.01 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Laporan forkopimcam | 2 Dokumen | 2 | | | | | | |
| | | Laporan Rakor Forkopimda | 12 Dokumen | 12 | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | | Laporan rakor rutin bidang pemerintahan | 2 Dokumen | 2 | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 60 dokumen | 0 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 1 dokumen | 2 dokumen | 100 % |
| 4.01.02.2.01.02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 32 dokumen | 0 | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 % | 5 dokumen | 8 dokumen | 100 % |
| 4.01.02.2.01.03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Dokumen LPPD | 1 dokumen | 1 | | | | | | |
| | | Dokumen SPM | 1 dokumen | 1 | | | | | | |
| | | Laporan Administrasi Umum | 12 dokumen | 12 | | | | | | |
| | | Publikasi melalui media cetak | 3 media | 3 | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 28 dokumen | 0 | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 % | 8 dokumen | 15 dokumen | 100 % |
| 4.01.02.2.04 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah | 100 Persen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.01.02.2.04.01 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti | 50 dokumen | 96 | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 240 dokumen | 0 | 54 dokumen | 60 dokumen | 111,11 % | 54 dokumen | 114 dokumen | 100 % |
| 4.01.02.2.04.02 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 4 dokumen | 0 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 1 dokumen | 2 dokumen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.02.2.04.03 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 4 dokumen | 0 | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 1 dokumen | 2 dokumen | 100 % |
| 04.01.04 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas | 87,5 Persen | 87,5 Persen | | | | | | |
| 4.01.04.2.03 | Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Persentase kelebagaan PD yang proporsional | 100 Persen | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.01.04.2.03.02 | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di kapanewon | 3 dokumen | 3 dokumen | | | | | | |
| | | Fasilitasi penyusunan rencana kegiatan penugasan urusan keistimewaan di kapanewon | 2 dokumen | 2 dokumen | | | | | | |
| 4.01.0 4.5.01 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewa an | Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksan aan keistimewaa n | 89,5 persen | 0 | 88 % | 88 % | 100 % | 88,5 % | 88,5 % | 100 % |
| 4.01.0 4.5.01.07 | Penerapan dan Pendampin gan Keistimewa an di Kapanewon /Kemantre n dan | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaa n di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi | 12 dokumen | | 7 dokumen | 7 dokumen | 100 % | 1 dokumen | 8 dokumen | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | Kalurahan/ Kelurahan | | | | | | | | | |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai AKIP | 83 Angka | | 83 Angka | | - | - | - | - |
| 4.01.01.2.02 | Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian kinerja administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.02.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.05.05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Pemilaian Kinerja Pegawai | 1 Dokumen | | - | - | - | - | - | - |
| 4.01.01.2.06 | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.01 | Sub Kegiatan Penyedaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | | 20 Paket | 20 Paket | 100% | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.01.2.06.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan | 6 Paket | | 6 Paket | 6 Paket | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.05 | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket | | 5 Paket | 5 Paket | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.06 | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan | 12 dokumen | | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.09 | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80 dokumen | | 12 dokumen | 12 dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.10 | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD | 2 dokumen | | 2 dokumen | 2 dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.11 | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 dokumen | | 4 dokumen | 4 dokumen | 100% | - | - | - |
| 4 01 01 2.08 | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | | 100 % | 100 Persen | 100 % | - | - | - |
| 4.01.01 .2.08.0 1 | Sub Kegiatan Penyedia an Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | | 4 Laporan | 2 Laporan | 50% | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.01.2.08.02 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 kali | | 12 kali | 12 kali | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.08.03 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.08.04 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | - | - | - |
| 4 01 01 2.09 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | - | - | - |
| 4 01 01 2.09 01 | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 7 unit | | 8 unit | 8 unit | 100% | - | - | - |
| 4 01 01 2.09 06 | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 10 unit | | 2 unit | 2 unit | 100% | - | - | - |
| 4 01 01 2.09 09 | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | | 1 unit | 1 unit | 100% | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | |
| 04 01 03 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender | 80 Persen | | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen | 80 Persen |
| 4 01 03 2.03 | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 100 Persen | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen |
| 4 01 03 2.03 01 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 161 Dokumen | | 144 Dokumen | 111 Dokumen | 77 % | 161 Dokumen | 272 Dokumen | 100 % |
| 4 01 03 2.03 02 | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 5 Dokumen | | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100% | 5 Dokumen | 10 Dokumen | 100 % |
| 4 01 03 2.03 03 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1310 Orang | | 1078 Orang | 1078 Orang | 100% | 1310 Orang | 2388 Orang | 100 % |
| Bagian Organisasi | | | | | | | | | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | capaian Nilai AKIP | 83 | 83,36 | 83 | 83,36 | 83,36 | 83 | 83 | 100 % |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | - | - | - |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | - | - | - |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 9 Paket | 9 Paket | 9 Paket | 100 % | - | - | - |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Alat Tulis Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 12 Paket | 100 % | - | - | - |
| | | Jumlah Paket Peralatan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 Paket | 100 % | - | - | - |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 10 Paket | 10 Paket | 10 Paket | 10 Paket | 100 % | - | - | - |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah cetakan dan penggandaan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | - | - | - |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | pembayaran langganan surat kabar | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | - | - | - |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | - | -- | - |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah | 16 Laporan | 16 Laporan | 16 Laporan | 16 Laporan | 100 % | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 100 % | 15 Dokumen | 45 Dokumen | 100 % |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Belanja Jasa Tenaga Non ASN | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | - | - | - |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Proentaase pemenuhan sarana prasarana aparatur | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 % | - | - | - |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 7 Unit | 7 Unit | 7 Unit | 7 Unit | 100 % | - | - | - |
| | Kegiatan Penataan Organisasi | Capaian Kinerja penataan oragnisasi perangkat daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Draft Perbub tentang Evaluasi Analisis Beban Kerja | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 2 dokumen | 4 dokumen | 100 % |
| | | Draft Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah | 39 dokumen | - | 9 dokumen | 9 dokumen | 100 % | 1 dokumen | 10 dokumen | 100 Persen |
| | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Pendampingan penilaian inovasi pelayanan publik se Kabupaten Bantul | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 | 2 dokumen | 4 dokumen | 100 persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Standard Operating Prosedur dan Ketatalaksanaan seluruh OPD | - | - | - | 1 dokumen | 100 % | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 persen |
| | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kab. Bantul | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 4 dokumen | 6 dokumen | 100 persen |
| | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Prosentase urusan keistimewaan yang berkualitas | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 persen |
| | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Persentase Kinerja pentaan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 persen |
| | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten | Dokumen monitoring dan evaluasi urusan kelembagaan di Kabupaten Bantul | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 7 PD | 7 PD | 100 persen |
| | Perumusan kebijakan analisis kebijakan dan pengembangan kinerja jabatan | Peningkatan Kapasitas ASN yang mengelola Anjab pada perangkat daerah pengampu urusan keistimewaan di Kabupaten Bantul | 50 % | 50 % | 50 % | 50 % | 100 % | 50 % | 50 % | 100 persen |
| | | Dokumen Analisis Jabatan Perangkat Daerah pengmpu urusan keistimewaan di Kabupaten Bantul | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 1 dokumen | 3 dokumen | 100 persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan | Tingkat Penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN Pemda DIY | 78.6 | 78.6 | 80 | 80.69 | 100,86 % | 82 | 82,5 | 100,6 persen |
| | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten | Agen Perubahan Budaya Pemerintahan SATRIYA | 54 ASN | 54 ASN | 54 ASN | 54 ASN | 100% | 54 ASN | 108 ASN | 100 persen |
| | | Tersusunnya rencana Aksi Tahunan Budaya Pemerintahan SATRIYA | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 4 Dokumen | 6 Dokumen | 100 persen |
| Bagian Umum dan Protokol | | | | | | | | | | |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 | 83 | 83 | 83,36 | 100,43 % | 83 | 83 | 100 % |
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 48 dokumen | 144 dokumen | 144 dokumen | 144 dokumen | 100 % | 144 dokumen | 288 dokumen | 100 % |
| 4.01.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 80 paket | 32 paket | 32 paket | 32 paket | 100 % | 32 paket | 96 paket | 100 % |
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 132 | 16 paket | 16 paket | 16 paket | 100 % | 16 paket | 48 oaket | 100 % |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100 paket | 13 paket | 13 paket | 13 paket | 100 % | 13 paket | 39 paket | 100 % |
| 4.01.01.2.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 68 paket | 8 paket | 8 paket | 8 paket | 100 % | 8 paket | 24 paket | 100 % |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 56 paket | 3 paket | 3 paket | 3 paket | 100 % | 3 paket | 9 paket | 100 % |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 32 paket | 8 paket | 8 paket | 8 paket | 100 % | 8 paket | 24 paket | 100 % |
| 4.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 32 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100 % | 12 laporan | 36 laporan | 100 % |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 712 laporan | 120 laporan | 120 laporan | 120 laporan | 100 % | 120 laporan | 360 laporan | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 % | 2 dokumen | 6 dokumen | 100 % |
| 4.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 8 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 1 dokumen | 3 dokumen | 100 % |
| 4.01.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.01.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 peket | 10 peket | 10 peket | 10 peket | 100 % | 10 peket | 10 peket | 100 % |
| 4.01.01.2.07.06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 100 % | 7 unit | 7 unit | 100 % |
| 4.01.01.2.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 100 % | 6 unit | 6 unit | 100 % |
| 4.01.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 100 % | 6 unit | 6 unit | 100 % |
| 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.01.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 96 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100 % | 12 laporan | 36 laporan | 100 % |
| 4.01.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | 48 laporan | 36 laporan | 36 laporan | 36 laporan | 100 % | 36 laporan | 108 laporan | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | | Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | | | |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 52 laporan | 50 laporan | 50 laporan | 50 laporan | 100 % | 50 laporan | 150 laporan | 100 % |
| 4.01.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 244 laporan | 63 laporan | 63 laporan | 63 laporan | 100 % | 63 laporan | 186 laporan | 100 % |
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 unit | 6 unit | 6 unit | 6 unit | 100 % | 6 unit | 6 unit | 100 % |
| 4.01.01.2.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32 unit | 56 unit | 56 unit | 56 unit | 100 % | 56 unit | 56 unit | 100 % |
| 4.01.01.2.09.05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 20 unit | 25 unit | 25 unit | 25 unit | 100 % | 25 unit | 25 unit | 100 % |
| 4.01.01.2.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 121 unit | 100 unit | 100 unit | 100 unit | 100 % | 100 unit | 100 unit | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.01.2.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 7 unit | 100 % | 7 unit | 7 unit | 100 % |
| 4.01.01.2.11 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.01.01.2.11.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 2 orang | 2 orang | 2 orang | 2 orang | 100 % | 2 orang | 6 orang | 100 % |
| 4.01.01.2.11.02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 176 paket | 36 paket | 36 paket | 36 paket | 100 % | 36 paket | 108 paket | 100 % |
| 4.01.01.2.11.04 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 200 orang | 20 orang | 20 orang | 20 orang | 100 % | 20 orang | 60 orang | 100 % |
| 4.01.01.2.12 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.01.01.2.12.01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 4 paket | 1 paket | 1 paket | 1 paket | 100 % | 1 paket | 3 paket | 100 % |
| 4.01.01.2.12.02 | Penyediaan Kebutuhan Rumah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 12 paket | 2 paket | 1 paket | 1 paket | 100 % | 1 paket | 4 paket | 100 % |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | |
| 4.01.01.2.12.03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 8 paket | 2 paket | 2 paket | 2 paket | 100 % | 2 paket | 6 paket | 100 % |
| 4.01.01.2.14 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4.01.01.2.14.01 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 20 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 12 laporan | 100 % | 12 laporan | 36 laporan | 100 % |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat | | | | | | | | | | |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Nilai AKIP | 83 | 83 | 83 | 83,36 | 100,43 % | - | - | - |
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Pelaksana Tugas ASN | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN | 48 Dokumen | - | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Komponen Instalasi Listrik | | 7Jenis | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 28 Paket | - | 1 Paket | 1 Paket | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 130 Paket | - | 9 Paket | 9 Paket | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Barang Cetakan | | 2 Jenis | | | | | | |
| | | Penggandaan | | 8000 Lembar | | | | | | |
| | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 16 Paket | | 4 Paket | 4 Paket | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Bahan Bacaan Langganan Surat Kabar | | 1 Jenis | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 4 Dokumen | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Tamu | | 60 Orang/Makan | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 20 Laporan | - | 4 Laporan | 4 Laporan | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.08 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Hasil Rapat | | 10 Dokumen | | | | | | |
| | | Perjalanan Dalam Daerah | | 300 Orang Pergi | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | | Perjalanan Luar Daerah | | 125 Orang Pagi | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 168 Laporan | - | 14 laporan | 14 Laporan | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | - | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | 4 Dokumen | - | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | - | - | - |
| 4.01.02.02.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Alat Tulis Kantor | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Peralatan Kantor | | 10 Jenis | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Kantor | | 10 Jenis | | | | | | |
| | | Pengadaan Peralatan Kebersihan | | 1 Jenis | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 18 Laporan | - | 6 Laporan | 6 Laporan | 100% | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.02.02.08.03 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan | | 96 Orang/Bulan | | | | | | |
| | | Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan kantor | | 1 Dokumen | | | | | | |
| | | Laporan Administrasi Pelayanan Umum Kantor | | 3 Dokumen | | | | | | |
| | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 20 Laporan | 96 Dokumen | 60 Laporan | 60 Laporan | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.09 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pajak Kendaraan | | | | | | | | |
| | | Pemeliharaan Kendaraan Dinas | | 9 Unit | | | | | | |
| | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 9 Unit | - | 9 Unit | 9 Unit | 100% | - | - | - |
| 04.01.02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | 100 Persen | 100 Persen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | KESEJAHTERAAN RAKYAT | Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti | | | | | | | | |
| 4.01.02.2.02 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Capaian Kinerja Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | 100 Persen | 100 Persen | 100% |
| 4.01.02.2.02.01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Fasilitasi Kegiatan Keagamaan | | | | | | | | |
| | | Fasilitasi Sarana Prasarana Tempat Ibadah | | | | | | | | |
| | | Laporan Fasilitasi Bina Mental Spiritual Baznas | | | | | | | | |
| | | Laporan Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Anak Yatim Piatu | | | | | | | | |
| | | Pemberdayaan Kaum Rois | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 72 Dokumen | 103 Kali | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 100% | 24 Dokumen | 48 Dokumen | 100% |
| 4.01.02.2.02.02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Kajian Perumusan Kebijakan Pengembangan Kesehatan | | | | | | | | |
| | | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Sosial | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 26 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100% | 6 Dokumen | 18 Dokumen | 100% |
| 4.01.02.2.02.03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Kajian Perumusan Kebijakan Pengembangan Pendidikan | | | | | | | | |
| | | Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Pengembangan Pendidikan dan Pariwisata | | | | | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 24Dokumen | 3Dokumen | 6Dokumen | 6Dokumen | 100% | 6 Dokumen | 15 Dokumen | 100% |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| Bagian PPSDA | | | | | | | | | | |
| 04.01.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83 Angka | 83 Angka | 83 Angka | 83,36 Angka | 100,43% | - | - | - |
| 4.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 48 Dokumen | 0 Dokumen | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 322 Paket | 0 Paket | 24 Paket | 24 Paket | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 0 Paket | 3 Paket | 3 Paket | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 96 Dokumen | 0 Dokumen | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 590 Laporan | 0 Laporan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | - | - | - |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 4 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.06.11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 4 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 16 Laporan | 0 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | - | - | - |
| 4.01.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | 6 Unit | 0 Unit | 6 Unit | 6 Unit | 100% | - | - | - |
| 04.01.03 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Persentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindak lanjuti | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen |
| 4.01.03.2.01 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabuapten | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| 4.01.03.2.01.01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 32 Dokumen | 0 Dokumen | 8 Dokumen | 8 Dokumen | 100% | - | - | - |
| 4.01.03.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD | - | - | - | - | - | 8 Dokumen | 16 Dokumen | 50 Persen |
| 4.01.03.2.02 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen |
| 4.01.03.2.02.02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 20 Laporan | 0 Laporan | 5 Laporan | 5 Laporan | 100% | 5 Laporan | 10 Laporan | 50 Persen |
| 4.01.03.2.04 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen | 100% | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen |
| 4.01.03.2.04.01 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kalautan dan Perikanan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 28 Dokumen | 0 Dokumen | 7 Dokumen | 7 Dokumen | 100% | 7 Dokumen | 14 Dokumen | 50 Persen |
| 4.01.03.2.04.02 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan | 4 Dokumen | 0 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 12 Dokumen | 13 Dokumen | 325 Persen |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Target Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 | Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 | | | Target Kinerja Tahun 2024 | Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Target Kinerja Tahun 2023 | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Tingkat Realisasi Tahun 2023 (%) | | Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2024 | Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (8) = (7/6) | 9 | (10) = (5+7+9) | (11) = (10/4) |
| | Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | | | | | | | | |

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Tahun 2023 pada Tabel 2.1.2 , dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| Bagian Perencanaan dan Keuangan | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 4. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 6. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 7. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 8. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 9. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 10. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 11. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Indikator sub kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 12. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 13. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 14. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 15. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 16. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 17. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 18. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 19. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 20. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Indikator sub kegiatan tercapai |
| Bagian Hukum | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 12 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Indikator kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 13 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 14 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 15 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyusunan rancangan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 16 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| Bagian Tata Pemerintahan | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 12 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 13 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 14 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 15 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 16 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Indikator sub kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 17 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 18 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 19 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 20 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penataan Kelembagaa n dan Ketatalaksa naan Keistimewa an | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 21 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyedaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Sesuai dengan realisasi dokumen yang masuk ke Bagian PBJ |
| 12 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 13 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 14 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 15 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 16 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 17 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabillitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 18 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Dilakukan konsolidasi paket pekerjaan sehingga menyebabkan jumlah paket menjadi berkurang, namun secara keseluruhan telah terlaksana |
| 19 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 20 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Indikator kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Indikator sub kegiatan tercapai |
| Bagian Organisasi | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 12 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penataan Organisasi | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 13 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penataan Organisasi | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 14 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penataan Organisasi | Indikator kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 15 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penataan Organisasi | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 16 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 17 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Perumusan kebijakan analisis kebijakan dan pengembangan kinerja jabatan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 18 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten | Indikator sub kegiatan tercapai |
| Bagian Umum dan Protokol | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 12 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 13 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 14 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 15 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 16 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 17 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 18 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 19 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 20 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 21 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 22 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | Indikator sub kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 23 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 24 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 25 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 26 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 27 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 28 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Indikator sub kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 29 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 30 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 31 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 32 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 12 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 13 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 14 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 15 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Indikator sub kegiatan tercapai |
| Bagian PPSDA | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Indikator sub kegiatan tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Indikator program tercapai |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja | Faktor Penghambat |
|---|---|---|
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 10 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 11 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 12 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kalautan dan Perikanan | Indikator sub kegiatan tercapai |
| 13 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Indikator program tercapai |
| | Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Indikator kegiatan tercapai |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Indikator sub kegiatan tercapai |

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel beriku :

Tabel 2.1.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| Bagian Perencanaan dan Keuangan | | |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | - Koordinasi yang baik antar unit Bagian dalam penyusunan dokumen perencanaan |
| 2. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | - Koordinasi yang baik antar unit Bagian dalam penyusunan dokumen DPA |
| 3. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | - Koordinasi yang baik antar unit Bagian dalam pelaksanaan bimtek dan penyusunan laporan capaian kinerja |
| 4. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja<br>- Data yang akurat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja<br>- Koordinasi yang baik antar unit Bagian |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | - Didukung SIM Gaji |
| 6. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan |
| 7. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | - Kesiapan personal pelaksana kegiatan<br>- Koordinasi yang baik antar unit Bagian |
| 8. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Kesiapan personal pelaksana kegiatan pengadaan peralatan listrik |
| 9. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Kesiapan personal pelaksana kegiatan pengadaan barang dan jasa |
| 10. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan |
| 11. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan |
| 12. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 13. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan penatausahaan arsip |
| 14. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - Dilakukan penjadwalan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan |
| 15. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Perkembangan teknologi persuratan dan pengiriman dokumen |
| 16. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Dilakukan penjadwalan terhadap pemeliharaan peralatan kantor |
| 17. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Kesiapan personal pelaksana kegiatan |
| 18. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Telah dilakukan penjadwalan terhadap pembayaran pajak kendaraan dan pelaksanaan pemeliharaan kendaraan |
| 19. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | - Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan |
| 20. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan dengan lancar |
| Bagian Hukum | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan SPBE pada SKPD | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Kegiatan direncanakan dengan baik<br>- Kesiapan personil pelaksana kegiatan |
| 12 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | - Meningkatnya perkembangan kebutuhan regulasi daerah<br>- Dukungan anggaran dan optimalisasi SDM dalam fasilitasi penyelenggaraan kegiatan |
| 13 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum | - Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memperjuangkan hak hukumnya<br>- Dukungan anggaran dan SDM dalam |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan |
| 14 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi | - Dokumen produk hukum yag selesai proses tanda tangan langsung didokumentasikan dan diunggah pada produk hukum JDIH sehingga update regulasi berjalan sesuai dengan rencana<br>- Layanan informasi ke masyarakat tersampaikan melalui tatap muka maupun melalui JDIH<br>- Dukungan anggaran dan SDM dalam fasilitasi penyelenggaraan kegiatan |
| 15 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyusunan rancangan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan | - Koordinasi dengan PD maupun dengan Kanwil dan Biro Hukum lain berjalan sesuai rencana<br>- Adanya mekanisme perubahan pada setiap tahapan sehingga dapat diantisipasi dari awal apabila ada yang tidak sesuai sehingga dapat dilakukan penyesuaian<br>- Dukungan anggaran dan SDM |
| 16 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | - Antusias pamong dalam mengikuti pelaksanaan Bimtek Perkal terutama bagi pamong baru dan anggota Bamuskal<br>- Koordinasi dengan Kapanewon berjalan sesuai dengan rencana<br>- Dukungan anggaran dan SDM |
| Bagian Tata Pemerintahan | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | - Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 12 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |
| 13 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan | - Koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan<br>- Komunikasi/kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan |
| 14 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | - Kerja sama yang baik dengan pemangku kepentingan kegiatan penandaan batas daerah secara geodetik<br>- sinergi yang baik dengan kapanewon |
| 15 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | - Komunikasi dan koordinasi yang baik dan harmonis antara pelaksana kegiatan dengan pemangku |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | kepentingan yang terkait pelaksanaan otonomi daerah |
| 16 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | - Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan calon mitra kerja sama, mitra kerja sama, dan pemangku kepentingan terkait |
| 17 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | - Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan calon mitra kerja sama, mitra kerja sama, dan pemangku kepentingan terkait |
| 18 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | - Komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan calon mitra kerja sama, mitra kerja sama, dan pemangku kepentingan terkait |
| 19 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara | - Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait antara lain kapanewon, Bagian Organisasi, Bappeda, dan Paniradya Kaistimewan DIY |
| 20 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksa naan Keistimewaan | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan | - Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemangku kepentingan terkait antara lain kapanewon, Bagian Organisasi, Bappeda, dan Paniradya Kaistimewan DIY |
| Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Tersedianya data yang akurat |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | - Tersedianya data yang akurat |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyedaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia barang |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang<br>- Tersedianya data yang akurat |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang<br>- Tersedianya data yang akurat |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang<br>- Tersedianya data yang akurat |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | - Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang<br>- Tersedianya data yang akurat |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang<br>- Tersedianya data yang akurat |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang<br>- Tersedianya data yang akurat |
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang<br>- Tersedianya data yang akurat |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang |
| 12 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang |
| 13 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang |
| 14 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang |
| 15 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 16 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang |
| 17 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabillitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Adanya koordinasi yang baik dengan penyedia jasa dan barang |
| 18 | Program Perekonomian dan Pembangunan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - Adanya koordinasi yang baik dengan OPD lain dan pihak-pihak terkait<br>- Tersedianya data yang akurat |
| 19 | Program Perekonomian dan Pembangunan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | - Adanya koordinasi yang baik dengan OPD lain dan pihak-pihak terkait<br>- Tersedianya data yang akurat |
| 20 | Program Perekonomian dan Pembangunan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | - Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | - Adanya koordinasi yang baik dengan OPD lain dan pihak-pihak terkait<br>- Koordinasi yang baik dengan LKPP<br>- Tersedianya data yang akurat |
| Bagian Organisasi | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 12 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penataan Organisasi | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 13 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Penataan Organisasi | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 14 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penataan Organisasi | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 15 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penataan Organisasi | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan |
| 16 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | - Ada dukungan anggaran dari BKK dana keistimewaan, selain itu Biro Organisasi Pemda DIY memberikan arahan terhadap pelaksanaan di kabupaten kota se DIY sehingga pelaksnaan tiap kabupaten/kota sama |
| | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten | - Dukungan dari pemangku kepentingan (Perangat Daerah) dan adanya koordinasi yang intensif dari Koordinator Urusan Kelembagaan Pemda DIY (Biro Organisasi) dan Paniradya Kaistimewan |
| 17 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | - Ada dukungan anggaran dari BKK dana keistimewaan, selain itu Biro Organisasi Pemda DIY memberikan arahan terhadap pelaksanaan di |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | kabupaten kota se DIY sehingga pelaksnaan tiap kabupaten/kota sama |
| | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Perumusan kebijakan analisis kebijakan dan pengembangan kinerja jabatan | - Partispasi peserta peningkatan kapasitas ASN dari Perangkat Daerah<br>- Dukungan dari pemangku kepentingan ( Perangat Daerah ) dalam menyusun Anjab dan ABK |
| 18 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | - Ada dukungan anggaran dari BKK dana keistimewaan, selain itu Biro Organisasi Pemda DIY memberikan arahan terhadap pelaksanaan di kabupaten kota se DIY sehingga pelaksnaan tiap kabupaten/kota sama |
| | Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten | - Ada dukungan anggaran dari BKK dana keistimewaan, selain itu Biro Organisasi Pemda DIY memberikan arahan terhadap pelaksanaan di kabupaten kota se DIY sehingga pelaksnaan tiap kabupaten/kota sama |
| Bagian Umum dan Protokol | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | - Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 12 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Mebel | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 13 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 14 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 15 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 16 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 17 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 18 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 19 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 20 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 21 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 22 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 23 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 24 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 25 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 26 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 27 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 28 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 29 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 30 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 31 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| 32 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan | - Adanya koordinasi yang baik antar pelaksana kegiatan dan/atau dengan pihak penyedia |
| Bagian Kesejahteraan Rakyat | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana<br>- Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Koordinasi yang intensif pimpinan dengan staff dalam pelaksanaan tugas bagian<br>- Adanya komitmen atau disiplin staff dalam melaksanakan tugas |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | - Tersedianya anggaran yang memadai<br>- Adanya kebutuhan komponen instalansi listrik untuk kelancaran bagian |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Adanya pengadaan peralatan dan perlengkapan kanto, printer, komputer, dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Adanya kebutuhan barang cetak dan penggandaan untuk bagian<br>- Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Adanya kebutuhan informasi melalui koran/majalah<br>- Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | - Tersedianya anggaran yang memadai<br>- Banyaknya kunjungan kerja di bagian |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Tersedianya anggaran yang memadai<br>- Terlaksananya kunjungan kerja dalam negri |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | - Tersedianya anggaran yang memadai<br>- Terbelinya Perlengkapan Penyimpanan Arsip Dinamis |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD | - Tersedianya peralatan komputer yang modern<br>- Adanya petugas atau staff yang menguasai pengetahuan tentang IT |
| 10 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Tersedianya anggaran yang memadai<br>- Adanya kebutuhan pemeliharaan alat kantor untuk kelancaran tugas bagian |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| 11 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | - Tersedianya anggaran yang memadai<br>- Koordinasi yang baik dengan pihak penyedia jasa<br>- Tersedianya penyedia jasa pelayanan umum kantor yang cakap dan terampil |
| 12 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | - Tersedianya anggaran yang memadai<br>- Tersedianya sarana mobilitas untuk kelancaran tugas bagian<br>- |
| 13 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | - Koordinasi yang baik dengan Kalurahan kecamatan dan stakeholder terkait Sekabupaten Bantul<br>- Ketersediaan anggaran yang memadai |
| 14 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | - Koordinasi yang baik antara bagian kesra dengan perangkat daerah atau instansi terkait<br>- Dorongan dan dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan<br>- Support dari pihak narasumber yang proaktif untuk mewujudkan tujuan dari monev |
| 15 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana |
| | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | - Koordinasi yang baik antara bagian kesra dengan perangkat daerah atau instansi terkait<br>- Dorongan dan dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan |
| Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Proses perencanaan yang efektif dan terukur |
| | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Sinergi yang baik dengan bendahara pengeluaran |
| 2 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | - Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Koordinasi yang baik dengan penyedia peralatan dan perlengkapan kantor |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Koordinasi yang baik dengan percetakan dan penyedia fotokopi |
| 4 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Koordinasi yang baik dengan penyedia barang bacaan |
| 5 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Koordinasi yang baik dengan katering dan akomodasi |
| 6 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |
| | Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Koordinasi yang baik dengan pengampu PPID |
| 7 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |
| | Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Koordinasi yang baik penyedia barang kearsipan |
| 8 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Koordinasi yang baik dengan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor |
| 9 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |
| | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | - Perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Koordinasi yang baik dengan Samsat, bengkel, dan SPBU |
| 10 | Program Perekonomian dan Pembangunan | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | - Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Koordinasi yang baik dan intens dengan BUMD, BLUD, BUKP, pengelola dana bergulir, dan pihak terkait |
| 11 | Program Perekonomian dan Pembangunan | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |
| | Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | - Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan |

| No | Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja | Faktor Pendukung Keberhasilan |
|---|---|---|
| | | - Koordinasi yang baik dan intens terkait Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan administrasi pembangunan dengan pihak terkait |
| 12 | Program Perekonomian dan Pembangunan | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kalautan dan Perikanan | - Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Koordinasi yang baik dan intens dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Tim Penyaluran KUR dan pihak terkait |
| 13 | Program Perekonomian dan Pembangunan | - Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan<br>- Komitmen yang tinggi dari semua pemangku kepentingan |
| | Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | - Proses perencanaan yang efektif dan terukur<br>- Sinergi yang baik antar para pemangku kepentingan |
| | Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | - Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan<br>- Koordinasi yang baik dan intens terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi, LPG 3 Kg dan pihak terkait |

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.1.2, dan Tabel 2.1.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta pembinaan administratif bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.
2. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaksanaan pembinaan administratif di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak azazi manusia serta dokumentasi dan informasi hukum.
4. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksaaan kebijakan serta pembinaan administratif bidang perekonomian, administrasi pembangunan dan sumber daya alam.
5. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan,pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
6. Meningkatkan kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang tata usaha, protokol, komunikasi pimpinan dan rumah tangga serta perlengkapan.
7. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
8. Meningkatkan kualitas koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, penatausahaan keuangan dan penyusunan pelaporan Sekretariat Daerah.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Realisasi Tahun 2022 | Tahun 2023 | | Target | | | Catatan Analisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Target | Realisasi | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | |
| 1 | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten | 82,96 | 81,2 | 82,47 | 82,65 | 82,65 | 82,65 | Target tahun 2023 tercapai dan target tahun selanjutnya disesuaikan dengan realisasi tahun terakhir |
| 2 | Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 145% | 100% | 100% | 100% | Dukungan dari seluruh stake holder sehingga target bisa tercapai. |
| 3 | Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan dari seluruh stake holder sehingga target bisa tercapai. |
| 4 | Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan dari seluruh stake holder sehingga target bisa tercapai. |
| 5 | Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B | 100% | 93% | 100% | 100% | 95% | 100% | Dukungan dari seluruh stake holder sehingga target bisa tercapai. |
| 6 | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Dukungan dari seluruh stake holder sehingga target bisa tercapai. |
| 7 | Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah | 97,90% | 85% | 97,49% | 95% | 95% | 95% | Target disesuaikan dengan realisasi tahun 2023 |

Sesuai pencapaian IKU Sekretariat Daerah Tahun 2023 yang disajikan pada Tabel 2.2.1, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU yang tidak memenuhi target.
2. IKU yang dapat memenuhi target adalah:
    a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten;
    b. Persentase perikatan kerjasama yang ditindaklanjuti;
    c. Persentase rancangan perda dan perkada yang diharmonisasi;
    d. Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu;
    e. Persentase perangkat daerah yang memiliki nilai IKM minimal B;
    f. Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti;
    g. Rata-rata pencapaian program Sekretariat Daerah.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Komitmen yang tinggi oleh pemangku kebijakan untuk memenuhi target kinerja pelaksanaan program Sekretariat Daerah.
b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan calon mitra kerja sama, mitra kerja sama, dan pemangku kepentingan terkait.
c. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dan harmonis antara Tim Penyusun, Tim Pereviu, dan pemangku kepentingan yang terkait dalam penilaian SAKIP.
d. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dalam penyusunan rancangan perda dan perkada dengan perangkat daerah pengusul.
e. Adanya komunikasi intensif yang berjalan baik dengan perangkat daerah dalam pelaporan capaian IKK LPPD.
f. Fasilitasi aplikasi pelaksanaan survey serta evaluasi yang terus menerus terhadap penilaian IKM di masing-masing perangkat daerah.
g. Adanya koordinasi dan komunikasi dengan perangkat daerah serta kelompok masyarakat pengusul kebijakan.

## 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.3.1

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

| Kekuatan | Kelemahan |
|---|---|
| Perencanaan produk hukum lebih tersistematis | Bagian Hukum kurang proaktif dalam sosialisasi propemperkada ke PD |
| Muatan substansi produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan NSPK | Kurangnya literatur peraturan perundang-undangan pada PD dan Bagian Hukum |
| Kerja sama antar daerah dalam menentukan status administrasi wilayah perbatasan | Kurangnya pemeliharaan pilar batas daerah |
| Adanya bimbingan teknis terkait Penyelenggaraan Nama Rupabumi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Data Geoportal | Kurangnya literasi terkait nama rupabumi |
| Adanya IKK LPPD sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. | Prioritas kebijakan perencanaan pembangunan belum seluruhnya mengakomodir capaian IKK LPPD |
| Perikatan kerja sama dengan instansi pendidikan tinggi cukup terbuka lebar | Keberlangsungan dan tindak lanjut perikatan kerja sama tergantung kepada prioritas kebijakan daerah |
| Integrasi hasil identifikasi dan pemetaan kerjasama daerah dalam dokumen perencanaan. | Belum terakomodirnya IKK LPPD dalam dokumen perencanaan daerah |

Selain itu, selama Tahun 2023 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.3.2

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2023

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| Komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM serta dengan Biro Hukum dalam upaya pengharmonisasian | Pergantian pejabat pengampu materi muatan pada PD yang sering terjadi |
| Dilaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah administratif | Mekanisme propemperkada yang belum tersampaikan di PD sehingga banyak dari PD yang mengajukan Perkada tidak melalui Propemperkada |
| Tersedia teknologi survei dan pemetaan serta aplikasi Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR) untuk kemudahan pelaksanaan survei, | Koordinasi di PD terkait materi muatan dalam produk hukum |

| Peluang | Tantangan |
|---|---|
| pengukuran dan pemetaan wilayah dan pembakuan nama rupabumi | |
| Komitmen perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan dalam menyediakan data capaian dan bukti dukung IKK LPPD | Masih terdapat daerah di wilayah perbatasan yang belum jelas status administrasinya |
| Adanya regulasi dari pemerintah pusat tentang tata cara kerjasama | Belum semua unsur alam dan buatan dibakukan nama rupabumi |
| | Belum terakomodirnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara keseluruhan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan |
| | Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah belum disesuaikan dengan regulasi pusat |

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023, maka strategi pada Tahun 2025 yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen Pimpinan serta kerjasama antar Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Sekretariat Daerah;
3. Peningkatan jejaring kerja dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul maupun antar *stake holder* terkait di luar Kabupaten Bantul;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4.1

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **Sekretariat Daerah** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | Kab. Bantul | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100% | 24.079.598.448 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100% | 24.066.272.968 | - |
| 1.1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 23.694.598.448 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 23.694.598.448 | - |
| 1.1.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2142 Orang/Bulan | 23.694.598.448 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 2142 Orang/Bulan | 23.694.598.448 | Terdapat penambahan personil di Setda yang belum teranggarkan |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Capaian kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 385.000.000 | Administrasi Keuangan Dan Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Capaian kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100% | 371.674.520 | - |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 28 Orang/Bulan | 385.000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 28 Orang/Bulan | 371.674.520 | - |
| | | | | **JUMLAH** | **24.079.598.448** | | | | **JUMLAH** | **24.066.272.968** | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **Bagian Perencanaan dan Keuangan** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | Kab. Bantul | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100% | 1.155.790.120 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100% | 975.037.342 | |
| 1.1 | Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 281.244.000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | 71.210.000 | |
| 1.1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 8.700.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 8.700.000 | - |
| 1.1.2 | Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 25.125.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 2 Dokumen | 6.985.000 | - |
| 1.1.3 | Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 27.150.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Laporan | 6.600.000 | |
| 1.1.4 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 220.269.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 48.925.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 850.546.120 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 879.827.342 | |
| 1.2.2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 844.146.120 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 873.427.342 | |
| 1.2.3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 12 Laporan | 6.400.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 12 Laporan | 6.400.000 | |
| 1.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 24.000.000 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 24.000.000 | |
| 1.3.1 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 24.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 24.000.000 | |
| | | | | **JUMLAH** | **1.155.790.120** | | | | **JUMLAH** | **975.037.342** | |
| | | | | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **Bagian Hukum** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Kab. Bantul | Persentase Perda dan Perkada yang diharmonisasi | 100 persen | 490.495.600 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Kab. Bantul | Persentase Perda dan Perkada yang diharmonisasi | 100 persen | 525.994.060 | |
| 1.1 | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 100 persen | 490.495.600 | Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | 100 persen | 525.994.060 | |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Produk Hukum yang disusun | 660 dokumen | 259.720.600 | Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Produk Hukum yang disusun | 632 dokumen | 262.201.060 | Adanya proses harmonisasi di Kemenkumham menyebabkan menurunnya jumlah indicator |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum | Kab. Bantul | Jumah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum | 10 kasus | 138.800.000 | Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum | Kab. Bantul | Jumlah kasus yang mendapat fasilitasi bantuan hukum | 20 kasus | 149.425.000 | Berdasarkan realisasi sampai pertengahan tahun 2024, jumlah kasus yang difasilitasi hanya sedikit. |
| 1.1.3 | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi | Kab. Bantul | Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan | 660 dokumen | 91.975.000 | Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi | Kab. Bantul | Jumlah produk hukum dan pengelolaan informasi hukum yang didokumentasikan | 600 dokumen | 114.368.000 | Adanya proses harmonisasi dan penggabungan penyusunan produk hukum yang sama sehingga |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | menyebabkan penurunan target. |
| 2 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Kab. Bantul | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan | 89,5 persen | 120.235.000 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Kab. Bantul | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan | 89,5 persen | 120.235.000 | |
| 2.1 | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Kab. Bantul | Capaian Kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan | 100persen | 120.235.000 | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Kab. Bantul | Capaian Kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan | 100 persen | 120.235.000 | |
| 2.1.1 | Sub Kegiatan Penyusunan rancangan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan | Kab. Bantul | Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan | 4 dokumen | 43.910.000 | Sub Kegiatan Penyusunan rancangan produk hukum kab/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan | Kab. Bantul | Jumlah produk hukum kabupaten/kota tindak lanjut pelaksanaan kewenangan keistimewaan | 2 dokumen | 43.910.000 | |
| 2.1.2 | Sub Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Kab. Bantul | Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan | 1 dokumen | 76.325.000 | Sub Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | Kab. Bantul | Jumlah dokumen hasil pengawasan produk hukum kalurahan | 1 dokumen | 76.325.000 | |
| | | | | **JUMLAH** | **610.730.600** | | | | **JUMLAH** | **646.229.060** | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **Bagian Tata Pemerintahan** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | 92 Persen | 575.519.700 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Persentase Ketersediaan data pendukung dokumen LPPD tahun N-1 dalam rangka evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | 92 Persen | 421.140.023 | |
| 1.1 | Administrasi Tata Pemerintahan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan | 100 Persen | 501.494.700 | Administrasi Tata Pemerintahan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan | 100 Persen | 353.799.523 | |
| 1.1.1 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 1 dokumen | 172.554.700 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | 13 dokumen | 131.615.523 | Penurunan target disebabkan ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan. |
| 1.1.2 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 8 dokumen | 116.825.000 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 5 dokumen | 57.300.000 | |
| 1.1.3 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 7 Dokumen | 212.115.000 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | 4 Dokumen | 164.884.000 | |
| 1.2 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah | 100 Persen | 74.025.000 | Fasilitasi Kerjasama Daerah | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah | 100 Persen | 400.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1.2.1 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 58 dokumen | 44.050.000 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | 62 dokumen | 37.362.500 | 60 Dok Kerjasama (MoU dan PKS)<br>1 Dok Pemetaan potensi Kerjasama daerah<br>1 Dok workshop Kerjasama daerah |
| 1.2.2 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 1 dokumen | 14.987.500 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | 1 dokumen | 14.990.500 | 1 Dok rakor kerja sama luar negeri |
| 1.2.3 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 Laporan | 14.987.500 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | 1 Laporan | 14.990.500 | |
| 2 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas | 89 persen | 326.710.000 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Persentase Urusan Keistimewaan yang berkualitas | 89 persen | 326.710.000 | |
| 2.1 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan | 89 persen | 326.710.000 | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Capaian kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan | 89 persen | 326.710.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 2.1.1 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi | 3 dokumen | 326.710.000 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | Kab. Bantul. Bantul. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/ Kemantren dan Kalurahan /Kelurahan yang Didampingi | 1 dokumen | 326.710.000 | Pelaksanaan Dana Keistimewaan direncanakan untuk menambah anggaran untuk membangun Aplikasi baru untuk kegiatan monitoring dan evaluasi kapanewon |
| | | | | **JUMLAH** | **902.229.700** | | | | **JUMLAH** | **747.850.023** | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Kab. Bantul | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender | 80 Persen | 821.883.985 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Kab. Bantul | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan metode tender | 80 Persen | 681.252.188 | |
| 1.1 | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 100 Persen | 821.883.985 | Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul | Capaian Kinerja Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 100 Persen | 681.252.188 | |
| 1.1.1 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 400 Dokumen | 55.562.000 | Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | 200 Dokumen | 20.800.000 | Target Indikator turun karena penyesuaian proses pelaksanaan PBJ |
| 1.1.2 | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 2 Dokumen | 74.979.500 | Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Kab. Bantul | Jumlah DokumenHasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | 5 Dokumen | 36.724.500 | |
| 1.1.3 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1583 orang | 691.342.485 | Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | 1,000 orang | 623.727.688 | |
| | | | | **JUMLAH** | **821.883.985** | | | | **JUMLAH** | **681.252.188** | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **Bagian Organisasi** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota | Kab. Bantul | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100% | 457.602.800 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Persentase perencanaan dan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel | 100% | 441.102.888 | |
| 1.1 | Penataan Organisasi | Kab. Bantul | Rightsizing/kesesuaian dengan indikator potensi beban kerja yang ada dalam regulasi tentang kelembagaan | 100% | 449.507.300 | Penataan Organisasi | Kab. Bantul | Rightsizing/kesesuaian dengan indikator potensi beban kerja yang ada dalam regulasi tentang kelembagaan | 100% | 439.827.888 | |
| 1.1.1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 12 Dokumen | 130.891.050 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | 12 Dokumen | 167.093.638 | |
| 1.1.2 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 Dokumen | 90.106.500 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Laporan | 67.981.500 | Pendampingan penyusunan SOP, Standar pelayanan |
| 1.1.3 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 4 Dokumen | 144.317.950 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | 2 Dokumen | 137.082.950 | Dokumen pelaksanaan SAKIP dan RB |
| 1.1.4 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 3 Dokumen | 84.191.800 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 2 Dokumen | 67.669.800 | Dokumen Penyusunan PEKPP, SKM |
| 1.2 | Admininstrasi Umum Perangkat Daerah | Kab.. Bantul | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 8.095.500 | Admininstrasi Umum Perangkat Daerah | Kab.. Bantul | Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 16.820.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1.2.1 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 8.095.500 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 1 Dokumen | 1.275.000 | Laporan koordinasi pelaksanaan SPBE |
| 2 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Kab. Bantul | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan | 89,5 persen | 223.249.000 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | Kab. Bantul | Persentase kelembagaan perangkat daerah dan kalurahan pada urusan keistimewaan | 89,5 persen | 335.653.000 | |
| 2.1 | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Kab. Bantul | Capaian Kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan | 100 persen | 100.000.000 | Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Kab. Bantul | Capaian Kinerja penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan keistimewaan | 100 persen | 200.000.000 | |
| 2.1.1 | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota | 4 Lembaga | 100.000.000 | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota | 7 Lembaga | 200.000.000 | Penambahan target sudah disesuaikan dengan kebutuhan di tahun 2025 |
| 2.2 | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Budaya Pemerintahan | 81% | 123.249.000 | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Kab. Bantul | Cakupan Peningkatan Budaya Pemerintahan | 100% | 135.653.000 | |
| 2.2.1 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 123.249.000 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen | 135.653.000 | Tambahan penambahan pin satriya |
| | | | | **JUMLAH** | **680.851.800** | | | | **JUMLAH** | **664.351.888** | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **Bagian Umum dan Protokol** | | | | | | | | | | | |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Bantul | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,36 angka | 6.362.057.955 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kab. Bantul | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | 83,36 angka | 5.273.452.190 | Berdasarkan realisasi tahun 2023 |
| 1.1 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 persen | 5.000.000 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 persen | 5.000.000 | |
| 1.. 1.1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Bantul | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 20 paket | 5.000.000 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Kab. Bantul | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 20 paket | 5.000.000 | Pakaian Kerja Lapangan |
| 1.2 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum dan Protokol) | 100 persen | 1.279.680.750 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum dan Protokol) | 100 persen | 865.972.450 | |
| 1.2 .1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 33 paket | 60.002.690 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 33 paket | 56.336.390 | |
| 1.2 .2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 paket | 77.303.060 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 25 paket | 71.891.060 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| 1.2.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 17 paket | 400.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kab. Bantul | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 17 paket | 400.000 | |
| 1.2.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 paket | 121.730.000 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Kab. Bantul | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 14 paket | 42.280.000 | |
| 1.2.5 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8 laporan | 254.000.000 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 8 laporan | 214.000.000 | |
| 1.2.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 178 laporan | 764.745.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 178 Laporan laporan | 479.565.000 | |
| 1.2.7 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3 dokumen | 1.500.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 3 dokumen | 1.500.000 | |
| 1.3 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | 4.498.781 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | 4.000.000 | |
| 1.3.1 | Pengadaan Mebel | Kab. Bantul | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 unit | 3.000.000 | Pengadaan Mebel | Kab. Bantul | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 4 paket | 1.500.000 | |
| 1.3.2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 95.000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 700.000 | |
| 1.3.3 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 229.257 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | 2 unit | 1.800.000 | BM Lukisan |
| 1.3.4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan | 1 unit | 1.174.524 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 unit | 0 | dihapus |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | Lainnya yang Disediakan | | | | | | | | |
| 1.4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | 1.862.644.284 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100 persen | 1.832.644.284 | |
| 1.4.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24 laporan | 1.200.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 24 laporan | 1.200.000 | |
| 1.4.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 123.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 93.000.000 | disesuaikan dengan realisasi terakhir |
| 1.4.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 laporan | 36.150.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 13 laporan | 36.150.000 | |
| 1.4.4 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 61 laporan | 1.702.294.284 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 61 laporan | 1.702.294.284 | Laporan Kegiatan Tenaga Non ASN (58) Karangan Bunga Pimpinan (1) PEmbayaran PBB (1) Kegiatan koordinasi dengan media massa (1) |
| 1.5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 persen | 1.639.934.140 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 persen | 1.079.519.200 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | Pemerintahan Daerah | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | |
| 1.5.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 unit | 459.621.400 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 10 unit | 181.300.000 | Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32 unit | 326.152.540 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Bantul | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 32 unit | 259.000.000 | Pajak Kendaraan, Pemeliharaan Kendaraan |
| 1.5.3 | Pemeliharaan Mebel | Kab. Bantul | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 unit | 10.000.000 | Pemeliharaan Mebel | Kab. Bantul | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 10 unit | 6.000.000 | Peningkatan jumlah mebel |
| 1.5.4 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 unit | 144.150.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 unit | 144.150.000 | |
| 1.5.5 | Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 unit | 700.010.200 | Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Bantul | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 7 unit | 489.069.200 | |
| 1.6 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 persen | 912.250.000 | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 100 persen | 831.400.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| 1.6.1 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 44 paket | 212.250.000 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 44 paket | 131.400.000 | |
| 1.6.2 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20 orang / bulan | 700.000.000 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 20 orang / bulan | 700.000.000 | |
| 1.7 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 100 persen | 374.000.000 | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | 100 persen | 374.000.000 | |
| 1.7.1 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 1 paket | 160.000.000 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | 1 paket | 160.000.000 | |
| 1.7.2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 paket | 120.000.000 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | 1 paket | 120.000.000 | |
| 1.7.3 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 2 paket | 94.000.000 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Kab. Bantul | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | 2 paket | 94.000.000 | |
| 1.8 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 100 persen | 284.050.000 | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Kab. Bantul | Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 100 persen | 280.916.256 | |
| 1.8.1 | Fasilitasi Keprotokolan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | 284.050.000 | Fasilitasi Keprotokolan | Kab. Bantul | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | 12 Laporan | 280.916.256 | |
| | | | | **JUMLAH** | | | | | **JUMLAH** | **5.273.452.190** | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| **Bagian Kesejahteraan Rakyat** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Kab. Bantul | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 3.078.437.659 | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Kab. Bantul | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat Yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 9.605.776.989 | |
| 1.1 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Kab. Bantul | Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat | 100 Persen | 3.078.437.659 | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Kab. Bantul | Cakupan Penyelenggaraan Evaluasi Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat | 100 Persen | 9.605.776.989 | |
| 1.1.1 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 18 Dokumen | 2.523.142.000 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 18 Dokumen | 9.039.894.500 | Kegiatan rutin untuk fasilitasi anak yatim piatu kebijakan Bupati(dgn regulasi Perbup) untuk memberikan penghargaan bagi Hafidz Qur'an Kebijakan Bupati untuk Fasilitasi Kegiatan Non Muslim dan kajian kitab keislaman Kegiatan lomba MTQ/STQ agenda rutin tiap tahun tingkat kabupaten dan tingkat nasional Fasilitasi kegiatan rutin baznas, honor ketua baznas dan staf baznas |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | **Program/Kegiatan** | **Lokasi** | **Indikator Kinerja** | **Target Capaian** | **Pagu Indikatif** | |
| | | | | | | | | | | | Hibah tempat ibadah dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat |
| 1.1.2 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 20 Dokumen | 429.266.459 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 20 Dokumen | 439.853.289 | |
| 1.1.3 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 3 Dokumen | 126.029.200 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | 3 Dokumen | 126.029.200 | |
| | | | | **JUMLAH** | **3.078.437.659** | | | | **JUMLAH** | **9.605.776.989** | |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| **Bagian PPSDA** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Kabupaten Bantul | Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 360.251.503 | Program Perekonomian dan Pembangunan | Kabupaten Bantul | Prosentase Kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang Ditindaklanjuti | 100 Persen | 408.609.206 | |
| 1.1 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Kabupaten Bantul | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten | 100 Persen | 65.950.000 | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Kabupaten Bantul | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Kabupaten | 100 Persen | 115.285.000 | |
| 1.1 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 8 Dokumen | 65.950.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 8 Dokumen | 115.285.000 | Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan BUMD (3), BLUD (1), BUKP (1), Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pengangkatan dan Pembehertian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (2) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana Bergulir (1) |
| 1.2 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Kabupaten Bantul | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten | 100 Persen | 41.499.500 | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Kabupaten Bantul | Capaian Pelaksanaan Kebijakan Administrasi Pembangunan Kabupaten | 100 Persen | 34.612.400 | |
| 1.2.1 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 5 Laporan | 41.499.500 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Kabupaten Bantul | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 5 Laporan | 34.612.400 | Dokumen Pelaksanaan TPID (4) dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi |

| No | Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025 | | | | | catatan penting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | |
| | | | | | | | | | | | Kebijakan Pembangunan (1) |
| 1.3 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Kabupaten Bantul | Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten | 100 Persen | 252.802.003 | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Kabupaten Bantul | Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Kabupaten | 100 Persen | 258.711.806 | |
| 1.3.1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 7 Dokumen | 23.800.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | 7 Dokumen | 19.762.500 | Dokumen Pelaksanaan TPAKD (4), Penyaluran KUR (2) dan Koordinasi Bidang SDA (1) |
| 1.3.2 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 1 Dokumen | 229.002.003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | 12 Dokumen | 238.949.306 | Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Sumber Daya Mineral dan LH (2), Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (2), Penyusunan Regulasi Kebijakan (5), Pelaksanaan Administrasi Kantor Lainnya (3) |
| | | | | **JUMLAH** | **360.251.503** | | | | **JUMLAH** | **408.609.206** | |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2025 serta tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul
Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Musholla Al Huda Kersan Rt. 04 Tirtonirmolo Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 50.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 2 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Baabul Jannah, Nyemengan Tirtonirmolo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 100.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 3 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | An Ni'mah Kretek Lor Jambidan Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 50.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 4 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana | Mushola Al Huda ,RT 06 Bawuran II ,Bawuran | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan | 1 Paket | 30.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | ,Pleret, Kab. Bantul | Bina Mental Spiritual | | | dan Rehab Tempat Ibadah |
| 5 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Al Ittihad, Watu Panjangrejo, Pundong | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 100.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 6 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Gereja Santo Petrus Kanisius Jomegatan Ngestiharjo Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 100.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 7 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Gereja Suci Gunung Sempu, Gunung Sempu Tamantirto Kasihan, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 100.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 8 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Al BarokahWatu Argomulyo Sedayu, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 65.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 9 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Mushola Al Hidayah, Puton, Trimulyo, Jetis | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 40.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 10 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Al-Hikmah, Jalan Kyai Mustajab, Bulus Wetan, Dk Nogosari | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 100.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 11 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Bobok Patalan Jetis, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 100.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 12 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan | Masjid Al Ikhlas, Talaban RT4, | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan | 1 Paket | 50.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Kebonagung, Imogiri | Bina Mental Spiritual | | | dan Rehab Tempat Ibadah |
| 13 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Miftahurrohman, Pengkol, Sriharjo, Imogiri | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 50.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 14 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Piyungan Kwasen, Srimartani, Piyungan, Bantul. , Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 195.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan untuk Kegiatan Ormas Keagamaan |
| 15 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Kembang putihan RT 03 Guwosari Pajangan Bantul , Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 175.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan untuk Kegiatan Ormas Keagamaan |
| 16 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Baitussalam, Bebekan Kadekworo Gilangharjo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 17 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid AL Muttaqin, Banjarwaru Gilangharjo, | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 18 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Al Hidayah, Nogosari Krekan RT. 08, Gilangharjo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 19 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Musholla Nurul Hikmah, Tirto RT 06, Triharjo | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 20 | Program Pemerintahan dan | Mushola Daarul Asyiqin, | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi | 1 Paket | 50.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Gunungpuyuh, Panjangrejo, Pundong | Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 21 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Baitul Makmur, Kembangsongo, Trimulyo, Jetis | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 50.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 22 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid AL Ikhlas Tempel Rt 05, Sidomulyo, Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 30.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 23 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Al Miftakh, Monggang RT 05, Srihardono, Pundong | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 50.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 24 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Musholla Rohmatulloh, Bejen RT 08 Bantul, Bantul, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 50.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 25 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Nurul Huda, Mredo RT 01, Bangunharjo, Sewon, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 25.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 26 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Ridwanillah, Dadapan RT 03, Timbulharjo, Sewon, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 25.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 27 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Nurul Jariah, Sengon Karang, Argomulyo, Sedayu, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 50.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 28 | Program Pemerintahan | Masjid Lidz dzikro, | Jumlah Dokumen | 1 Paket | 25.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Mantup RT 12 Baturetno, Banguntapan, Kab. Bantul | Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 29 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Assalam, Mantup RT 16, Baturetno, Banguntapan, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 25.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 30 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Al Amien Miri RT 25, Pendowoharjo, Sewon, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 25.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 31 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Uswatun Hasanah,Nam bangan RT 05 Seloharjo, Pundong | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 150.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 32 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid An Nur, Ponggok I Trimulyo, Kab. Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 200.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 33 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Nurudhdhola m, Brajan RT 03, Tamantirto, Kasihan, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 30.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 34 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Gereja Santo yakobus Klodran, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 25.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 35 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Gereja Paroki Santo Paulus Pringgolayan, Jalan Wulung No 8, Banguntapan, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 75.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | BADKO TKA-TPA Kabupaten Bantul, Komplek Masjid Agung Manunggal Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 50.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 37 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Al Ikhlash, Jaten RT 40, Argosari, Sedayu, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 38 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Baitul Muqoddimah, Teruman Dk. Kresen RT 001, Bantul, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 35.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 39 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Mushola Al-Amien, Srumbung RT 02 Segoroyoso, Pleret, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 40 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Mushola Al Huda, Srumbung RT 06 Segoroyoso, Pleret, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 30.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 41 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Mushola Sam-Sumiyati, Melikan Lor, Gandekan, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000, | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 42 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Mushola Raudhatul Jannah, Dukuh RT 05, Gedangan, Panjangrejo, Pundong | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 43 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan | DPC Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Bantul, Wonokromo II, | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 35.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Kesejahteraan Rakyat | Wonokromo, Pleret, Bantul | | | | |
| 44 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Al-Amina, Kalipakel, Donotirto, Kretek | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 35.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 45 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Al Barokah, Soka, Seloharjo, Pundong, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 35.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 46 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Dewan Masjid Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 50.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 47 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Ridhwanillah, Dadapan, Timbulharjo, Sewon, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 35.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 48 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Nurul Huda, Barongan Barongan, Sumberangung, Jetis, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 35.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 49 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Al-Auliya', Dingkikan, Argodadi, Sedayu, Bantul (Lokasi TPS3R) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 70.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 50 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Mushola At-Thoyibah, Sukoharjo RT 046, Argodadi, Sedayu, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 35.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 51 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksana | Masjid Baiturrohim, Puton, Trimulyo, Jetis, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan | 1 Paket | 35.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | an Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | Bina Mental Spiritual | | | dan Rehab Tempat Ibadah |
| 52 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Panti Asuhan Yatim Putra Islam An-Nur Bantul, Bantulkarang, Ringinharjo, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 53 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Panti Asuhan Bina Siwi, Pajangan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 54 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Panti Asuhan Mukti Insani, Tingas RT 06, Cepoko, Sumbermulyo, Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 55 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Panti Asuhan Yatim Piatu Piyungan "YAPITU", Piyungan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 56 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Al Qomar, Sumbermulyo, Bambanglipuro | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 200.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 57 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Rumah Ibadah Kapel St. Albertus Magnus, Gilangharjo, Pandak, Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 58 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | DPC PEPABRI BANTUL, Jl Pramuka No 6 Bantul | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 35.925.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 59 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan | PCNU Bantul, Jl. Masda Adisucipto NO 45 | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan | 1 Paket | 150.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan |

| No | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Volume | Besaran/ Volume | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | | Bina Mental Spiritual | | | dan Rehab Tempat Ibadah |
| 60 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | MUI Kabupaten Bantul, Kompleks Kantor Kemenag Jalan Dr.Wahidin Sudirohusodo 16, Karanggayam, | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 100.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 61 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Mushola Al Ikhlas, Ngepek, Argodadi, Sedayu | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 20.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 62 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Masjid Miftahul Huda, Ngepek, Argodadi, Sedayu | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 30.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 63 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Ngentak, Jojoran Kulon, Triwidadi, Pajangan | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 35.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |
| 64 | Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Parisada Hindu Dharma, IndonesiaJl Pura No 37 Plumbon | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | 1 Paket | 15.000.000 | Hibah Ormas Keagamaan Untuk Pembangunan dan Rehab Tempat Ibadah |

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah kebijakan nasional Tahun 2025 dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Tema Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 8 (delapan) Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).

PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.

PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.

PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.

PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.

PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan prioritas nasional tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan komitmen Pimpinan serta kerjasama antar Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Sekretariat Daerah;
3. Peningkatan jejaring kerja dengan Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul maupun antar stake holder terkait di luar Kabupaten Bantul;
4. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2025 dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2025 adalah ”Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastuktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah” dengan Prioritas Daerah sebagai berikut:

1. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemerataan kualitas infrastruktur.
3. Peningkatan SDM berdaya saing.
4. Pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.
5. Pemantapan layanan publik berbasis informasi teknologi.
6. Pengembangan kawasan Pansela dan kawasan industri Piyungan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2025 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah Tahun 2025

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Realisasi | | Perkiraan Realisasi Tahun 2024 | Target Tahun 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tahun 2022 | Tahun 2023 | | |
| 1 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel | Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP | 82,96 | 82,47 | 82,65 Angka | 82,65 |
| 2 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel | Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah | Persentase perikatan kerja sama yang ditindaklanjuti | 100% | 145% | 100% | 100% |
| 3 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel | Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah | Persentase rancangan perda yang diharmonisasi | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel | Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah | Presentase Perangkat Daerah yang melaporkan capaian IKK LPPD secara tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel | Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah | Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal B | 100% | 100% | 100% | 95% |
| 6 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel | Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah | Persentase kebijakan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel | Meningkatnya kinerja penyelengaraan Pemerintahanan Daerah | Rata-rata pencapaian Program Sekretariat Daerah | 97,9% | 97,49% | 95% | 90% |

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2025 disajkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Sekretariat Daerah

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | Sekretariat Daerah | | | | | | 24.066.272.968,00 | | | | | | | 19.446.307.267,00 | |
| | X | | | | | NON URUSAN | | | | | | 24.066.272.968,00 | | | | | | | 19.446.307.267,00 | |
| | X | X X | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX | | | | | | 24.066.272.968,00 | | | | | | | 19.446.307.267,00 | |
| 1 | X | X X | 0 1 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah | - | | | 83 Angka | 24.066.272.968,00 | | | | | | - | 19.446.307.267,00 | |
| | X | X X | 0 1 | 2.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (bagian Perencanaan dan keuangan) | - | | | 100 Persen | 23.694.598.448,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | - | 19.277.367.467,00 | |
| | X | X X | 0 1 | 2.0 2 | 000 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2240 Orang/bulan | 23.694.598.448,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 19.277.367.467,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | X | X X | 0 1 | 2.1 1 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian | - | | | 100 persen | 371.674.520,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | 168.939.800,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Umum dan Protokol) | | | | | | | | | Teknologi Informatika | | | | |
| | X | XX | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 28 Orang/Bulan | 371.674.520,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 168.939.800,00 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | | | | | | Bagian Kesejahteraan Rakyat | | | | | | 9.605.776.989,00 | | | | | | | 8.790.601.800,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 9.605.776.989,00 | | | | | | | 8.790.601.800,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 9.605.776.989,00 | | | | | | | 8.790.601.800,00 | |
| 2 | 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti | - | | | 100 Persen | 9.605.776.989,00 | | | | | | - | 8.790.601.800,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | Persentase Kebijakan dan Fasilitasi Kegiatan Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti | - | | | 100 Persen | 9.605.776.989,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Masyarakat | - | 8.790.601.800,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | 18 Dokumen | 9.039.894.500,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Masyarakat | | 8.183.532.700,00 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | | | | 20 Dokumen | 439.853.289,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Masyarakat | | 303.534.550,00 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | | | 3 Dokumen | 126.029.200,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Masyarakat | | 303.534.550,00 | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| | | | | | | Bagian Tata Pemerintahan | | | | | | 747.850.023,00 | | | | | | | 1.600.805.700,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 747.850.023,00 | | | | | | | 1.600.805.700,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 747.850.023,00 | | | | | | | 1.600.805.700,00 | |
| 3 | 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Ketersediaan Data Pendukung Dokumen LPPD Tahun N-1 dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) | - | | | 92 persen | 421.140.023,00 | | | | | | - | 1.274.095.700,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | | Administrasi Tata Pemerintahan | Capaian kinerja administrasi tata pemerintahan (bagian tata pemerintahan) | - | | | 100 Persen | 353.799.523,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | - | 1.042.080.700,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | 15 Dokumen | 131.615.523,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | | 204.815.700,00 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | 5 Dokumen | 57.300.000,00 | Semua Kota/ Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | | 305.375.000,00 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | 4 Dokumen | 164.884.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | | 531.890.000,00 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 02 | 2.04 | | Fasilitasi Kerja Sama Daerah | Capaian kinerja fasilitasi kerjasama daerah | - | | | 100 Persen | 67.340.500,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul | - | 232.015.000,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri | | | | 62 Dokumen | 37.362.500,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul | | 191.515.000,00 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri | | | | 1 Dokumen | 14.987.500,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul | | 22.750.000,00 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
| | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama | | | | 1 Laporan | 14.990.500,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Pemangku Kepentingan di Kabupaten Bantul | | 17.750.000,00 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
| 4 | 4 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan | - | | | 89 Persen | 326.710.000,00 | | | | | | - | 326.710.000,00 | |
| | 4 | 01 | 04 | 5.01 | | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | - | | | 89 Persen | 326.710.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Seluruh kapanewon | - | 326.710.000,00 | |
| | 4 | 01 | 04 | 5.01 | 0007 | Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi | | | | 1 Dokumen | 326.710.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Seluruh kapanewon | | 326.710.000,00 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN |
| | | | | | | Bagian Perencanaan dan Keuangan | | | | | | 975.037.342,00 | | | | | | | 243.895.000,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 975.037.342,00 | | | | | | | 243.895.000,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 975.037.342,00 | | | | | | | 243.895.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 5 | 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Persentase Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang efektif , efisien dan akuntabel | - | | | 100 Persen | 975.037.342,00 | | | | | | - | 243.895.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.01 | | Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (bagian perencanaan dan Keuangan) | - | | | 100 persen | 71.210.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Sekretariat Daerah | - | 155.095.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 8.700.000,00 | Kab. Bantul , Bantul , Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Sekretariat Daerah | | 18.800.000,00 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | | | | 2 Dokumen | 6.985.000,00 | Kab. Bantul , Bantul , Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Sekretariat Daerah | | 8.430.000,00 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 2 Laporan | 6.600.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Sekretariat Daerah | | 100.865.000,00 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 4 Laporan | 48.925.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Sekretariat Daerah | | 27.000.000,00 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (bagian Perencanaan dan keuangan) | - | | | 100 Persen | 879.827.342,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Sekretariat Daerah | - | 86.400.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 12 Dokumen | 873.427.342,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Sekretariat Daerah | | 74.400.000,00 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | | 12 Laporan | 6.400.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Sekretariat Daerah | | 12.000.000,00 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah (bagian perencanaan dan keuangan) | - | | | 100 Persen | 24.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Sekretariat Daerah | - | 2.400.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 24.000.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Sekretariat Daerah | | 2.400.000,00 | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| | | | | | | Bagian Hukum | | | | | | 646.229.060,00 | | | | | | | 1.210.000.000,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 646.229.060,00 | | | | | | | 1.210.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 646.229.060,00 | | | | | | | 1.210.000.000,00 | |
| 6 | 4 | 01 | 02 | | | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | Persentase Rancangan Perda yang diharmonisasi | - | | | 100 Persen | 525.994.060,00 | | | | | | - | 710.000.000,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum | Capaian Kinerja fasilitasi dan koordinasi hukum | - | | | 100 Persen | 525.994.060,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN dan Masyarakat | - | 710.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | | 632 Dokumen | 262.201.060,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN dan Masyarakat | | 380.000.000,00 | BAGIAN HUKUM |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | 56 Kasus | 149.425.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN dan Masyarakat | | 250.000.000,00 | BAGIAN HUKUM |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan<br>Pengelolaan Informasi Hukum | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | | | | 632 Dokumen | 114.368.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN dan Masyarakat | | 80.000.000,00 | BAGIAN HUKUM |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 7 | 4 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase penyelenggaraan keistimewaan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan | - | | | 89,5 Persen | 120.235.000,00 | | | | | | - | 500.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 04 | 5.01 | | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | Capaian Kinerja Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | - | | | 89 Persen | 120.235.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Masyarakat, ASN | - | 500.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 04 | 5.01 | 0005 | Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 43.910.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Masyarakat, ASN | | 310.000.000,00 | BAGIAN HUKUM |
| | 4 | 01 | 04 | 5.01 | 0008 | Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan | | | | 1 Dokumen | 76.325.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Masyarakat, ASN | | 190.000.000,00 | BAGIAN HUKUM |
| | | | | | | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | 681.252.188,00 | | | | | | | 1.526.207.735,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 681.252.188,00 | | | | | | | 1.526.207.735,00 | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 681.252.188,00 | | | | | | | 1.526.207.735,00 | |
| 8 | 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan dengan Metode Tender | - | | | 80 Persen | 681.252.188,00 | | | | | | - | 1.526.207.735,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Capaian kinerja pengelolaan pengadaan barang dan jasa | - | | | 100 Persen | 681.252.188,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Masyarakat, ASN | - | 1.526.207.735,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 200 Dokumen | 20.800.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Masyarakat, ASN | | 215.856.620,00 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | 5 Dokumen | 36.724.500,00 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Masyarakat, ASN | | 527.378.670,00 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 1000 Orang | 623.727.688,00 | Kab. Bantul, Bantul, Trirenggo | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Masyarakat, ASN | | 782.972.445,00 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA |
| | | | | | | Bagian Organisasi | | | | | | 664.351.888,00 | | | | | | | 1.147.431.000,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 664.351.888,00 | | | | | | | 1.147.431.000,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 664.351.888,00 | | | | | | | 1.147.431.000,00 | |
| 9 | 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran (Bagian Organisasi) | - | | | 100 Persen | 441.102.888,00 | | | | | | - | 840.730.500,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Pengelolaan Administrasi Umum (Bagian Organisasi) | - | | | 100 Persen | 1.275.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | - | 12.820.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 1 Dokumen | 1.275.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 12.820.000,00 | BAGIAN ORGANISASI |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | | Penataan Organisasi | RightSizing/kesesuian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan | - | | | 89.5 Persen | 439.827.888,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | - | 827.910.500,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 12 Dokumen | 167.093.638,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 275.700.000,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 2 Laporan | 67.981.500,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 185.860.500,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | 2 Dokumen | 137.082.950,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 239.900.000,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 2 Dokumen | 67.669.800,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 126.450.000,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| 10 | 4 | 01 | 04 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Persentase Kelembagaan Perangkat Daerah yang Proporsional | - | | | 89,5 persen | 223.249.000,00 | | | | | | - | 306.700.500,00 | |
| | 4 | 01 | 04 | 5.01 | | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan | RightSizing/kesesuian dengan indikator potensi/beban kerja yang ada dalam Peraturan Pemerintah tentang Kelembagaan | - | | | 100 Persen | 100.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | - | 140.900.500,00 | |
| | 4 | 01 | 04 | 5.01 | 0003 | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli<br>Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota | | | | 4 Lembaga | 100.000.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA KEISTIMEWAAN | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | | 140.900.500,00 | BAGIAN ORGANISASI |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 04 | 5.02 | | Peningkatan Budaya Pemerintahan | Cakupan Peningkatan Budaya Pemerintahan | - | | | 100 Persen | 123.249.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | - | 165.800.000,00 | |
| | 4 | 01 | 04 | 5.02 | 0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan<br><br>Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 123.249.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA KEISTIMEWAAN | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | | 165.800.000,00 | BAGIAN ORGANISASI |
| | | | | | | Bagian Umum dan Protokol | | | | | | 5.273.452.190,00 | | | | | | | 8.582.994.910,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 5.273.452.190,00 | | | | | | | 8.582.994.910,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 5.273.452.190,00 | | | | | | | 8.582.994.910,00 | |
| 11 | 4 | 01 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) | - | | | 83 angka | 5.273.452.190,00 | | | | | | - | 8.582.994.910,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rata-rata persentase capaian kinerja aparatur/pegawai(Bagian Umum dan Protokol) | - | | | 100 persen | 5.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | - | 16.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 20 Paket | 5.000.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | | 16.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Bagian Umum dan Protokol) | - | | | 100 persen | 865.972.450,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | - | 2.173.338.200,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 33 Paket | 56.336.390,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | | 70.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 25 Paket | 71.891.060,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | | 188.015.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 17 Paket | 400.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | | 127.273.400,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 14 Paket | 42.280.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | | 130.270.300,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 8 Laporan | 214.000.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | | 350.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 178 Laporan | 479.565.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | | 1.298.779.500,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | | | 3 Dokumen | 1.500.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | | 9.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | | | 100 Persen | 4.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | - | 109.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | | | | 4 Unit | 1.500.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 50.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 700.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | | 5.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan | | | | 2 Unit | 1.800.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 4.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 0,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 50.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum dan Protokol) | - | | | 100 persen | 1.832.644.284,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | - | 2.181.206.440,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 24 Laporan | 1.200.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | | 4.800.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 93.000.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | | 167.200.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 13 Laporan | 36.150.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | | 214.098.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 61 Laporan | 1.702.294.284,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Kabupaten Bantul | | 1.795.108.440,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | | | 100 Persen | 1.079.519.200,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | - | 2.303.405.020,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 10 Unit | 181.300.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 1.342.548.230,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 32 Unit | 259.000.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 206.089.550,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | | | 10 Unit | 6.000.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN Sekretariat Daerah | | 9.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 20 Unit | 144.150.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 76.310.160,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 7 Unit | 489.069.200,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 669.457.080,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bagian Umum dan Protokol) | - | | | 100 persen | 831.400.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | - | 912.250.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 44 Paket | 131.400.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 212.250.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 20 Orang/Bulan | 700.000.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | 700.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | Capaian Kinerja Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah | - | | | 100 Persen | 374.000.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | - | 423.846.000,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 1 Paket | 160.000.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 156.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 1 Paket | 120.000.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 215.000.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | | | 2 Paket | 94.000.000,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 52.846.000,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan | Capaian Kinerja Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Umum dan Protokol) | - | | | 100 persen | 280.916.256,00 | | | - | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | - | 463.949.250,00 | |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | | 12 Laporan | 280.916.256,00 | Kab. Bantul, Bantul, Bantul | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | - | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | ASN Sekretariat Daerah | | 463.949.250,00 | BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL |
| | | | | | | Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumberdaya Alam | | | | | | 408.609.206,00 | | | | | | | 357.834.000,00 | |
| | 4 | | | | | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | | | 408.609.206,00 | | | | | | | 357.834.000,00 | |
| | 4 | 01 | | | | SEKRETARIAT DAERAH | | | | | | 408.609.206,00 | | | | | | | 357.834.000,00 | |
| 12 | 4 | 01 | 03 | | | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | Persentase kajian Kebijakan Perekonomian Daerah yang ditindak lanjuti | - | | | 100 persen | 408.609.206,00 | | | | | | - | 357.834.000,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian | Capaian pelaksanaan kebijakan perekonomian kabupaten | - | | | 100 Persen | 115.285.000,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Perangkat daerah, BUMD, BLUD, BUKP, UMKM dan Pihak Terkait Lainnya | - | 183.584.000,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | 8 Dokumen | 115.285.000,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Perangkat daerah, BUMD, BLUD, BUKP, UMKM dan Pihak Terkait Lainnya | | 183.584.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
| | 4 | 01 | 03 | 2.02 | | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | - | | | 100 Persen | 34.612.400,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Perangkat Daerah, UMKM dan Pihak Terkait Lainnya | - | 75.000.000,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | 5 Laporan | 34.612.400,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Perangkat Daerah, UMKM dan Pihak Terkait Lainnya | | 75.000.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
| | 4 | 01 | 03 | 2.04 | | Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | Capaian Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam | - | | | 100 Persen | 258.711.806,00 | | | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Perangkat Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, UMKM, Sarana dan Prasarana Kantor, dan Pihak Terkait Lainnya | - | 99.250.000,00 | |
| | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2023 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2024 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2025 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja | | | | 7 Dokumen | 19.762.500,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Perangkat Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, UMKM, Sarana dan Prasarana Kantor, dan Pihak Terkait Lainnya | | 95.000.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
| | 4 | 01 | 03 | 2.04 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian | | | | 12 Dokumen | 238.949.306,00 | Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan Pemantapan Layanan P[ublic Berbasis Teknologi Informatika | Perangkat Daerah, Lembaga Jasa Keuangan, UMKM, Sarana dan Prasarana Kantor, dan Pihak Terkait Lainnya | | 4.250.000,00 | BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SUMBERDAYA ALAM |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | | | **43.068.831.854,00** | | | | | | | | **42.906.077.412,00** | |

# BAB V
# PENUTUP

Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan rancangan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul serta berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2025. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Sekretaris Daerah,

AGUS BUDI RAHARJA, SKM.M.Kes

NIP. 196808251991031010